

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Permasalahan pada penelitian ini merupakan permasalahan yang sangat luas yang dimana peneliti sendiri menggunakan teori dari Chris and Anshel Gash yakni *Collaborative Governance*. Teori yang digunakan tersebut menjelaskan mengenai proses *collaborative governance* baik dari *stakeholder* yakni pemerintah, swasta, maupun dari LSM atau masyarakat. Pada penelitian ini untuk membedakan dengan penelitian lainnya, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang mana memiliki suatu relevansi terhadap tema atau permasalahan yang didiskusikan.

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan seseorang sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penelitian ini. Kegunaan penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui hasil dan memperkaya kajian berupa informasi dan temuan-temuan dapat mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu pula, penelitian terdahulu untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan judul di penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis yaitu penelitian T. Anisa Pitri, yang mengenai *Kolaborasi Pemerintahan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*⁴⁴. Penelitian yang dilakukan mengenai kolaborasi tersebut memiliki masalah yang ditemukan oleh peneliti tersebut. Permasalahan yaitu masih minimnya sarana dan prasarana untuk pendidikan anak

⁴⁴ T. Anisa Pitri, yang mengenai. 2017. *Kolaborasi Pemerintahan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*. Jurnal Jom FISIP Volume 4 No. 2 (diakses 20 Februari 2019)

berkebutuhan khusus (ABK) yang menyebabkan tidak efektifnya dalam pembelajaran serta kurangnya tenaga pengajar sehingga mutu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Ketidak maksimalnya pendidikan ABK tersebut akan memperhambat pembangunan pendidikan di Provinsi Riau khususnya pendidikan mengenai ABK. Dari hasil temuan yang di dapatkan oleh peneliti tentang pendidikan ABK yaitu dimana Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental intelektual atau sosial dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Dalam penemuan tersebut jika dikaitkan dengan masalah yang ada maka dalam percepatan pembangunan pendidikan khususnya pendidikan anak kebutuhan khusus (ABK) ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan ksusus.

Relevansi dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang kolaborasi dalam pembangunan pendidikan. Hanya saja penelitian terdahulu ini objeknya adalah pendidikan untuk ABK yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat. Pendidikan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat bersaing di era globalisasi, sehingga pendidikan yang maju harus ditinjau dari mutu pendidikannya, karena dengan mutu pendidikan yang telah memenuhi standar nasional atau standar yang telah ditentukan maka pendidikan tersebut dapat bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya terutama dalam proses mengajar dan tenaga pengajar pendidikan ABK. Apa lagi pendidikan untuk anak kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dengan benar dan baik oleh pemerintah karena pendidikan anak kebutuhan khusus berbeda dengan pendidikan lain, sehingga dalam pendidikan anak kebutuhan khusus harus ada perhatian lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Suharto Putra dengan tema *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Bidang Pendidikan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia Tahun 2016-2017 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara)*⁴⁵ yang merupakan acuan dan referensi sebagai perbandingan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan yang sudah puluhan tahun, sehingga keterbelakangannya wilayah tersebut menjadikan wilayah yang kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terhambatnya perkembangan wilayah tersebut haruslah menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Keterbelakngnya wilayah tersebut akan berdampak pada pembangunannya juga, dimana pemerintah hanya berfokus pada daerah-daerah yang padat penduduk serta aksesnya mudah dan memiliki potensi untuk berkembang.

Pada peneletian yang dilakukan Suharto Putra dapat ditemukan bahwa dalam memenuhi hak setiap manusia merupakan perkara yang tidak mudah, apa lagi terkait dengan masyarakat di wilayah perbatasan yang mana pembangunan pendidikan yang masih minim dan pendidikan merupakan sebuah persyaratan awal yang mutlak yang harus di miliki oleh setiap orang. Pendidikan yang kurang berkembang di wilayah perbatasan merupakan PR pemerintah yang harus dipikirkan dengan baik, cermat serta dapat tanggap dalam pembangunan pendidikan dan pembangunan lainnya di wilayah perbatasan. Percepatan pembangunan pendidikan di wilayah pinggiran merupakan kewajiban pemerintah agar dapat mendorong pendidikan untuk setara dengan daerah maju.

Relevansi dengan penelitian terdahulu ini adalah penemuan atau hasil yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi pendidikan di daerah perbatasan Indonesia dengan

⁴⁵ Suharto Putra. 2018. *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Bidang Pendidikan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia Tahun 2016-2017 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara)*. Jurnal: Research Repository UMY (diakses 20 Februari 2019)

Malaysia yang masih jauh dari perhatian pemerintah. Perkembangan pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan tidak jauh dari pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan daerah tertinggal, yang mana pemerintah masih kurang efektif dalam percepatan pembangunan, hal hasil dalam menunjang percepatan pembangunan tersebut harus dilakukannya kolaborasi dengan pihak lain, agar dapat mempercepat pembangunan.

Kabupaten Sumbawa Barat sendiri melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan pendidikan. Namun, kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta bukan hanya sekedar kolaborasi biasa, karena dalam kolaborasi yang menggandeng pihak swasta tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial pihak swasta dan kolaborasi ini memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mempercepat pembangunan di bidang pendidikan agar Kabupaten Sumbawa Barat dapat bersaing dan terus maju bahkan tidak hanya di bidang pendidikan saja namun di bidang lainnya. Selain itu pula, dalam percepatan pembangunan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak setiap warga Negara agar mendapatkan ilmu, informasi, pendidikan yang layak.

Penelitian Adji Suradji mengenai *Collaborative Governance dalam Optimalisasi Program “Banjar Cerdas” pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar*⁴⁶, merupakan program yang mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. *Collaborative Governance* dalam program “Banjar Cerdas” merupakan program pemerintah yang belum berjalan dengan maksimal karena apabila dilihat dari deskripsi praktik faktor-faktor penentuan keberhasilan kolaborasi dalam program “Banjar Cerdas”

⁴⁶ Adji Suradji. 2017. *Collaborative Governance dalam Optimalisasi Program “Banjar Cerdas” pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar*. Jurnal: Dinamika Vol. 4, No. 4 (diakses 20 Februari 2019)

terutama 3 (tiga) faktor yakni *governance*, *administration*, *organizational autonomy* maka program “Banjar Cerdas” belum optimal.

Ketercapaian suatu program pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang disesuaikan dengan kelas-kelas umur, kemudian dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah siswa di Kota Banjar. Dengan melihat dari kisaran umur dan rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah maka akan terlihat berapa hasil jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Namun, di Kota Banjar jika dilihat dari lama sekolah hanya mencapai angka 6 sampai 9 tahun saja, padahal targer lama sekolah dalam program “Banjar Cerdas” adalah 12 tahun. Hal tersebut merupakan adanya kesalahan dalam pelaksanaan program “Banjar Cerdas” yang selama ini diimplementasikan.

Kurang optimalnya dalam pelaksanaan program tersebut membuat pemerintah daerah melakukan upaya pengoptimalan dengan cara berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Banjar melalui pendidikan dengan program “Banjar Cerdas” untuk jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atau sederajat. Kolaborasi tersebut sudah efektif dalam mewujudkan pengoptimalan pelaksanaan program “Banjar Cerdas” karena pemerintah daerahnya sendiri akan mengatur jalannya program dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memicu program kurang dalam pengimplementasiannya.

Penunangan keberhasilan program tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah daerah mengatur ulang strategi dalam implementasi program, baik dari penanggung jawab serta pengurus di bidang program “Banjar Cerdas” kemudian membenahi mutu pendidikan bahkan memilih tenaga pengajar yang berkualitas dan setiap sekolah-sekolah dalam pembelajarannya diwajibkan mengacu pada program pemerintah. Selain pemerintah,

masyarakat juga berperan dalam program tersebut, karena program dapat berjalan dengan baik apabila masyarakatnya juga berpartisipasi seperti orang tua yang menyekolahkan anak hingga mengenyam pendidikan 12 tahun dan bahkan mengawasi kinerja pemerintah dalam program “Banjar Cerdas” serta mendukung program pemerintah dengan cara lainnya. Kolaborasi yang terjalin tersebut, apabila masyarakat dan pemerintahnya mau bekerjasama maka program “Banjar Cerdas” akan dapat berjalan dengan lancar dan optimal dalam implementasinya.

Relevansi dengan penelitian terdahulu ini yaitu pemerintah daerah melakukan tindakan tertentu dalam pembangunan pendidikan. Hanya saja penelitian terdahulu mengangkat dari suatu program pemerintah yang telah ditetapkan menjadi program khusus yaitu program “Banjar Cerdas” dan bukan dari program yang diangkat dari suatu peraturan daerah yang dikembangkan dalam penelitian agar dapat mengetahui peraturan daerah tersebut sudah sejauh mana terlaksanakan seperti halnya yang peneliti lakukan yaitu mengangkat peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Subsidi Biaya Pendidikan. Peneliti mengangkat peraturan daerah tersebut karena Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah tertinggal yang dalam perkembangan wilayahnya masih jauh dengan daerah lain, sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai peraturan daerah tersebut dan tercetus sebuah pertanyaan mengenai seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memajukan wilayahnya dan seberapa jauh pemerintah melakukan kontribusi untuk mempercepat pembangunan di daerahnya tersebut. Namun, kolaborasi pemerintah baik dengan masyarakat, swasta atau elemen lainnya harus tetap terjalin untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di daerah yang masih keterbatasan.

Penelitian yang dilakukan Anwar Fuad Alamsyah Lubis mengenai *Collaborative Governance dalam Program Cerdas (Percepatan Rehabilitas dan Apresiasi terhadap Sekolah) di Kabupaten Deli Serdang* tersebut memiliki permasalahan terhadap infrastruktur sekolah yang dimana gedung sekolah dan prasarana sekolah telah banyak yang rusak sehingga dalam proses belajar mengajar kurang nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik⁴⁷. Kerusakan yang terjadi pada ruang-ruang yang ada di sekolah sudah pasti mengganggu dan menjadi kekhawatiran jika berada di dalam ruang kelas saat proses berjalannya pendidikan.

Permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu masih banyaknya ruang kelas yang rusak membuktikan bahwa pada anggaran yang diberikan untuk pendidikan belum bisa tercukupi dengan sepenuhnya, hal tersebut dapat dilihat dari data *Decentralized Basic Education 1* (DBE 1) Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama USAID dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota (SIPPK) tentang persentase ruang kelas rusak di kelima Kabupaten/Kota tersebut yang dilihat dari distribusi sekolah SD/MI yaitu RK rusak berat 80% ke atas mencapai 121 kerusakan, RK rusak berat 60% - 80% mencapai 61 kerusakan, RK rusak berat 40% - 60% mencapai 164 kerusakan, RK rusak berat 20% - 40% mencapai 59 kerusakan dan RK rusak dibawah 20% mencapai 364 kerusakan. Data kerusakan tersebut diambil pada dokumen laporan akhir DBE1 untuk Provinsi Sumatera Utara.

Laporan kerusakan diatas jika dibandingkan dengan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 2,5 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan lanjut yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah untuk sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama

⁴⁷ Lubis, Anwar Fuad Alamsyah. 2017. *Collaborative Governance dalam Program Cerdas (Percepatan Rehabilitas dan Apresiasi terhadap Sekolah) di Kabupaten Deli Serdang*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67252/Cover.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses 5 maret 2019)

(SMP). Dari data tersebut juga terlihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Masih banyaknya ruang kelas yang rusak membuktikan bahwa banyaknya anggaran yang di alokasikan untuk pendidikan tidak bisa sepenuhnya mengatasi permasalahan ketersediaan asset yang layak pakai dalam pendidikan.

Permasalahan yang terjadi jika terus menerus dibiarkan akan semakin berdampak pada mutu pendidikan, sehingga akan banyak ruang-ruang kelas yang tidak layak untuk dipergunakan dan berdampak juga pada angka putus sekolah. Oleh karena itu, dalam percepatan pembangunan rehabilitasi sekolah, pemerintah harus mencari inovasi untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar yaitu seperti masyarakat dan pihak swasta. Dukungan tersebut dapat dijadikan sebagai konsep *Collaborative Governance* karena jika mengandalkan pemerintah saja tidak dapat memenuhi penyediaan pelayanan di sektor pendidikan dengan baik tanpa bantuan dari pihak masyarakat dan swasta.

Relenvasi penelitian yang dilakukan oleh Anwar Fuad Alamsyah Lubis dengan peneliti yaitu sama-sama melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam perecepatan pembangunan. Namun, pada penelitian Anwar melihat dari pendidikan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya yang dikarenakan infrastruktur sekolah tidak dapat dipergunakan dengan layak karena alokasi dana yang Anwar Fuad Alamsyah Lubis kurang. Oleh karena itu, pemerintah setempat melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan swasta dalam percepatan pembangunan rehabilitasi sekolah agar permasalahan dapat cepat terselamatkan serta mengurangi angka putus sekolah, hal ini mengacu pada konsep asli masyarakat Indonesia yaitu gotong royong.

Penelitian yang ditulis oleh Aylin A'ing mengenai *Studi tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*⁴⁸ adalah jurnal yang membahas tentang pembangunan pada bidang pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu yang mengalami kekurangan tenaga guru yang berada di beberapa sekolah dan pada penempatan tenaga pendidik masih belum merata, dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan pembangunan pendidikan di Kecamatan Kayan Hulu masih terhambat.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang berada di kawasan tertinggal sangatlah mengkhawatirkan karena pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan baik secara sosial maupun kemampuan suatu daerah tersebut. Wilayah yang belum dapat menyeimbangkan pembangunannya dengan wilayah lain serta masih dibawah rata-rata dalam pembangunan maka akan berdampak pada pembangunan nasional karena masih ada saja wilayah yang tidak dapat mencapai kualitas pembangunan yang telah ditentukan dalam skala nasional. Hal tersebut terjadi karena pembangunan merupakan serangkaian yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, adanya langkah-langkah untuk ditempuh agar penanganan di daerah-daerah perbatasan dalam berbagai bidang pembangunan yang termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan dapat terpenuhi dan menjadikan kekuatan dalam pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan pendidikan untuk mengoptimalkan pembangunan dan menghindari ketimpangan pada masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

⁴⁸ Aylin A'ing. 2015. *Studi tentang Pembangunan Bidang pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*. E-jurnal Pemerintahan Integratif Vol. 3 Nomor 4. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/05/2015_aylin_aing_studi_tentang_pembangunan%20\(05-16-16-11-29-55\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/05/2015_aylin_aing_studi_tentang_pembangunan%20(05-16-16-11-29-55).pdf) (diakses 12 Maret 2019)

Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten dari hasil pemekaran yang berada di wilayah Kalimantan Utara dimana Kabupaten tersebut masih terpencil dan terisolir yang berbatasan langsung dengan Wilayah Malaysia. Minimnya perhatian pemerintah pada Kabupaten tersebut, membuat segala sesuatunya masih sangat langka dan bahkan kekurangan seperti kurangnya fasilitas ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan masyarakat serta pasar untuk kegiatan perekonomianpun semua masih sangat terbatas. Pembangunan yang tidak maksimal membuat minimnya infrastruktur pada Kabupaten Malinau serta kestabilan di daerah tersebut masih belum maksimal sehingga masyarakat menggunakan transportasi udara yang dapat dilalui penerbangan perintis.

Permasalahan pada pembangunan pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi PR pemerintah dan bahkan untuk semua lapisan masyarakat seperti halnya pada daerah Kabupaten Malinau yang masih rendah terutama pada sarana dan prasarana pendidikan yaitu terbatasnya rumah dinas guru dan sarana olahraga siswa serta perpustakaan sekolah dan kurangnya tenaga pendidik bagi sekolah diperbatasan serta jauhnya jarak antara sekolah dari tempat tinggal. Data dari Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kabupaten Malinau hanya berjumlah 9 (Sembilan) sekolah dari 5 (lima) Desa yang ada. Kurangnya tempat pendidikan di Kabupaten Malinau juga berpengaruh pada tenaga pendidik yang masih sangat sedikit. Oleh karena itu pendidikan di Kabupaten Malinau tidak berkembang. Permasalahan pada Kabupaten Malinau haruslah segera diselesaikan dengan mencari solusi untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Percepatan suatu daerah haruslah berawal dari inovasi baru yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyamakan pembangunan dan memenuhi setiap hak masyarakatnya.

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malinau dengan permasalahan pada Percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki relenvansi pada permasalahan mengenai pendidikan, karena pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat juga masih kekurangan dalam tenaga pendidik yang menyebabkan kurikulum pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menimbulkan masalah pada pembanguan pendidikan. Kurang optimalnya pada satu indikator saja membuat pembangunan akan terhambat yang disebabkan semua indikator tersebut saling berkesinambungan. Adanya permasalahan tersebut menjadikan pemerintah harus bergerak dengan cepat agar tidak menimbulkan masalah baru, apa lagi pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Prioritas pembangunan suatu daerah pastilah berbeda-beda karena dilihat dari daerah tersebut, mana yang kurang dalam pembangunannya. Namum, pembangunan pendidikan merupakan pembangunan yang harus diutamakan, sebab setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan informai, mendapatkan kecerdasan dengan pembelajaran dan pendidikan agar bangsa Indonesia kuat akan intelektual sehingga apabila manusianya sudah mendapatkan pendidikan dengan layak dan telah memenuhi standar-standar pendidikan secara nasional maka masyarakatnya sendirilah yang dapat memajukan suatu bangsa sebab, Negara yang kuat dan dapat bersaing dengan kawasan lain apabila masyarakatnya telah terpenuhi indeks pendidikannyanya.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas bahwa penelitian terdahulu yang memiliki suatu relevansi terhadap penelitian ini yang sama-sama membahas kolaborasi pemerintah dalam percepatan pembangunan pendidikan serta adanya kesamaan terhadap kolaborasi pemerintah dengan swasta. Namun, dari kelima penelitian terdahulu

dengan penelitian ini bisa dibilang cukup berbeda, hal tersebut dilihat dari teori yang digunakan, daerah atau tempat penelitian tidaklah sama dengan peneliti yang berfokus pada daerah tertinggal sedangkan penelitain terdahulu di daerah perbatasan walaupun masih daerah 3T.

Penelitian ini menggunakan teori dari Chris Ansell dan Alison Gash tentang model *collaborative governance* yang membahas mengenai proses dari *collaborative governance* sehingga penelitian ini berfokus pada pemnahasan *collaborative governance* antara stakeholder yakni Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dengan swasta khususnya PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sehingga nantinya akan saling berkaitan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yakni di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2 Model Collaborative Governance

Selama lebih dari beberapa tahun kebelakang ini, pemerintahan dunia mengalami banyak perubahan akibat dari banyak tekanan untuk bertindak lebih efisien dan efektif. Mereka terus bertransformasi mencari bentuk dan mendesain ulang bagaimana mengelola pemerintahan. Hasilnya adalah beberapa bentuk devolusi, *desentralisasi*, *downsizing*, dan *debirokratisasi* yang digabung dengan privatisasi, sistem kontrak, mengadopsi sistem bisnis yang memperlakukan masyarakat sebagai yang harus dilayani.

Pada masa saat ini permasalahan yang didapati oleh pemerintah menjadi cukup luas oleh sebab itu telah berkembangnya model *Collaborative governance* penelitian mengenai *Collaborative governance* sudah sangat sering dilakukan oleh pemerintahan pada obyek

lokasi mancanegara serta masih sedikit yang mengambil objek lokasi di Indonesia dan berfokus disuatu daerah Indonesia⁴⁹.

Komponen yang menjadi sangat penting dalam istilah *Collaborative governance* adalah “*Governance*”. Yang mana banyak penelitian yang telah membangun definisi *governance*, akan tetapi definisi yang diberikan masih hanya sebatas dengan apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, namun belum bersifat komprehensif, seperti yang dikemukakan oleh Lynn, Heinrich dan Hill bahwa pemeritahan secara luas merupakan sebagai rezim hukum, aturan, peradilan dan praktek-praktek yang membangun suatu pennyediaan barang publik. Definisi ini menggambarkan ruang struktur pemerintahan tradisional serta muncul bentuk badan pengambilan keputusan publik atau swasta⁵⁰.

Proses penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara memang terlihat melibatkan banyak aktor dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat atau negara dan permasalahan ini menjadi suatu indikator terciptanya suatu konsep yang pada penyelesaiannya meliputi integrasi antara berbagai sektor yang ada dalam suatu Negara. Hal ini Negara tidak lagi bisa menjalankan suatu penyelenggaraan pemerintah jika tidak ada suatu keterlibatan dari sektor lain seperti lembaga non-pemerintah atau actor-aktor yang dapat membantu pemerintah dalam suatu bidang, termasuk masyarakat dalam suatu negara.

Collaborative governance ini sendiri terjadi bukan semata-mata datang secara tiba-tiba, tetapi kedatangan konsep ini memang disebabkan dengan datangnya suatu masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan dan dengan itu adanya pihak yang mendorong untuk melakukannya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan sektor lainnya seperti

⁴⁹ Giat Tri Sambodo. 2016. *Pelaksanaan Collavborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta*. Hal. 3

⁵⁰ Junaidi. 2015. *Collaborative Governance dalam Upaya menyelesaikan krisis listrik di kota Tanjung pinang*. Hal. 8

non-pemerintah. Masalah yang dihadapi pada penelitian ini adalah pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat yang dirasa cukup kompleks dan memerlukan suatu tindakan kolaborasi oleh semua pihak yang terkait dengan masalah peningkatan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Adanya masalah yang dirasa cukup sulit diselesaikan akan mengharuskan terjadinya suatu kolaborasi sebagai upaya peecahan masalah yang memiliki legitimasi kuat karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan secara bersama-sama untuk bisa disetujui bersama.

Dijelaskan juga dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash secara umum *Collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena beberapa alasan yakni adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, adanya konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat paten dan sulit diredam dan adanya upaya mencari cara-cara baru untuk melegitimasi politik⁵¹.

Menurut Ansell and Gash pentingnya melakukan suatu konsep *Collaborative governance*, karena ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan *Collaborative governance* yaitu kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan, ketidakmampuan suatu kelompok-kelompok karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan, mobilitas kelompok kepentingan dan tingginya biaya dan politisasi regulasi⁵².

Selain itu menurut Slesky dan Parker rasionalitas penggunaan kemitraan antara pemerintah dengan non-pemerintah (swasta) dalam pembantuan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dibagi dalam 3 *platform* yakni 1). Adanya suatu ketergantungan sumberdaya yang mana dengan adanya suatu dukungan sumber daya dalam pelaksanaan penyelenggaraan

⁵¹ Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). 543-571

⁵² Ibid. 550-563

pemerintahan diyakini akan menumbuhkan suatu relasi yang mana akan menghasilkan suatu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik, 2). Isu-isu sosial yang tecipta diantara stakeholder seperti isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan dan yang mungkin dirasa mengganggu kepentingan mereka akan mendorong stakeholder tadi untuk menjadi lebih perhatian pada isu-isu tersebut dan menimbulkan suatu relasi atau kemitraan. Menguatnya tradisi *corporate social responsibility* (CSR) dalam banyak korporasi mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasi permasalahan isu social yang cenderung kompleks, 3). Adanya batas-batas antar sektor, kecenderungan semakin kaburnya ciri-ciri institusi pemerintah, masyarakat sipil dan korporasi membuat perbedaan diantara ketiganya menjadi semakin abstrak. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan penggunaan wewenang terhadap institusi yang seharusnya wewenang tersebut digunakan hanya untuk pemerintah tetapi dari pemerintah sendiri malah memberikannya pada sektor lain semisalnya swasta⁵³.

Disamping itu Slesky dan Parker, Gazley dan Brudney juga menyebutkan bahwa manfaat dari *Collaborative Governance* ini diyakini dapat memberikan suatu penghematan biaya penyelenggaraan pemerintahan pada para eksekutif dalam pelayanan publik, mengurangi kompetisi memperebutkan sumber daya, dan juga meningkatkan akses terhadap relawan dan sumberdaya lainnya⁵⁴.

Chris Anshell dan Alison Gash memberikan suatu definisi *Collaborative governance* secara jelas yakni konsep *Collaborative governance* merupakan suatu tipe dari *governance*. *Collaborative governance* sendiri membayangkan adanya suatu forum deliberatif, dimana para *stakeholder* yang terlibat dapat melakukan suatu kesepakatan terkait dengan

⁵³ Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm 270-284

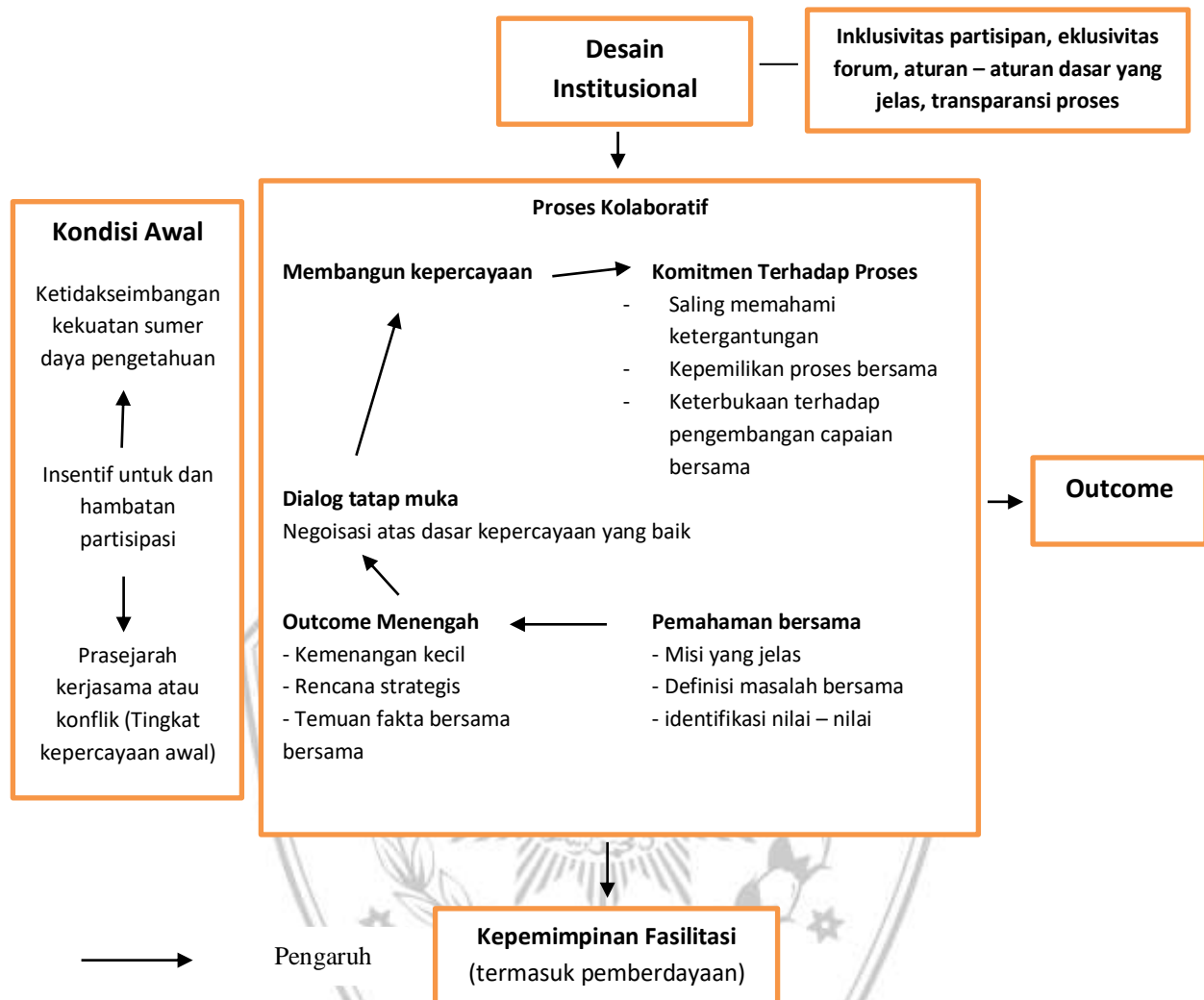
⁵⁴ Ibid. Hlm. 278 - 281

permasalahan publik tertentu. Pada model *Collaborative governance* ada 4 aspek penting yang harus diketahui yakni eksistensi forum deliberatif, aktor majemuk (negara dan non-negara), berorientasi konsensus, dan terkait kebijakan publik⁵⁵. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Proses kolaborasi ini bisa saja hanya berkolaborasi antar pemerintah dengan swasta atau dengan pihak-pihak lainnya. Namun, porsi keterlibatannya tidak selalu sama bobotnya, mungkin saja hanya terlibat dalam hal penyediaan data ke pemerintah atau memberikan bantuan yang dilakukan langsung secara intensif yang didanai oleh pihak asing atau swasta.



⁵⁵ Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). Hlm. 543-571

Bagan 1 Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell & Gash, 2007:550

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing variable secara rinci dan implikasinya terhadap model *Collaborative governance*.

a. Kondisi Awal

Pada variable kondisi awal ini merupakan suatu yang dapat mendukung suatu terjadinya kolaborasi, namun dapat pula melemahkan kolaborasi diantara pemangku kepentingan. Kondisi awal dapat terjadi dimana pemangku kepentingan memiliki suatu visi bersama yang ingin dicapai dengan melalui kolaborasi dan sejarah masa lalu serta kerjasama yang saling menghormati. pada kondisi awal variable ini dapat pula terjadi kepentingan yang lainnya.

Masalah umum yang terjadi dalam proses tata kelola kolaboratif adalah tidak ada individu yang mewakili pemangku kepentingan secara kolektif, beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki keterampilan dan keahlian untuk terlibat dalam pembicaraan yang bersifat teknis dan beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki waktu, tenaga atau kebebasan untuk terlibat dalam proses kolaboratif. Jika terjadi ketidakseimbangan kekuatan, sumberdaya dan pengetahuan diantara pemangku kepentingan, maka tata kelola kolaboratif memerlukan strategi untuk memberdayakan pemangku kepentingan yang lemah atau kurang terwakili.

Sejarah antagonisme dan kerjasama diantara pemangku kepentingan dapat menghambat atau mendukung jalannya kolaborasi, jika pada masa lalu dalam melakukan suatu kolaborasi sudah mendapatkan suatu tingkat kepercayaan yang rendah, strategi manipulasi dan komunikasi tidak jujur maka akan berdampak langsung pada proses kolaborasi, padahal disisi lain, keberhasilan sejarah kerjasama masalalu menjadi suatu indikator prosesnya terjadinya kolaborasi.

Model tata kelola kolaboratif menyarankan jika ada sejarah antagonisme di antara para pemangku kepentingan, tata kelola kolaboratif tidak mungkin berhasil kecuali adanya saling ketergantungan yang tinggi di antara pemangku kepentingan atau adanya langkah-langkah positif yang diambil untuk memulihkan tingkat kepercayaan yang rendah di antara pemangku kepentingan⁵⁶.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Pada variable ini merupakan suatu unsur yang penting yang membawa para pemangku kepentingan untuk bersama-sama berunding dan terlibat satu sama lain dalam semangat kolaborasi. Intervensi pihak ketiga dalam mediasi diperlukan sejauh pemangku kepentingan tidak dapat langsung mencapai suatu konsensus untuk berkolaborasi. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan suatu aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan antara institusi, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama.

Pemimpin kolaboratif harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi yang luas dan aktif, memastikan pengaruh dan kontrol yang luas, memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif dan memperpanjang lingkup proses. Tata kelola kolaboratif akan berhasil dengan mengandalkan jasa seorang mediator profesional apabila terjadi konflik yang tinggi, kepercayaan yang rendah, kesamaan sumber daya dan dorongan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Namun apabila terjadi ketidakseimbangan sumber daya atau dorongan untuk berpartisipasi, maka tata kelola kolaboratif lebih

⁵⁶ Indri Erkaningrum F. 2015. *Collaborative governance: daya upaya perguruan tinggi merealisasikan harapan pemangku kepentingan*. Yogyakarta. Hlm. 17 - 19

mungkin berhasil apabila ada pemimpin yang dihormati dan dipercaya dari berbagai pemangku kepentingan⁵⁷.

c. Desain Institusional

Variable yang satu ini lebih mengacu pada tata cara aturan dasar kolaborasi yang penting untuk bisa berlegitimasi pada proses kolaborasi. Proses tata kelola kolaboratif haruslah transparan dan inklusif karena keterbukaan proses akan membangun suatu kepercayaan pada pemangku kepentingan. Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam kolaborasi dan mengeksplorasi kemungkinan untuk mendapat keuntungan bersama.

Namun, terkadang pemangku kepentingan masuk dalam proses kolaborasi dengan menggunakan kerangka pemikiran yang skeptis (kurang percaya). Tata kelola kolaboratif berorientasi konsensus, meskipun konsensus tidak selalu tercapai. Masalah akhir desain institusional adalah penggunaan tanggal waktu yang mana itu menjadi sebab terbatasnya ruang lingkup pembahasan antar pemangku kepentingan dan melemahkan sifat kolaborasi keberlanjutan⁵⁸.

d. Proses Tata Kelola Kolaboratif

Proses ini sebenarnya sangat tergantung pada pencapaian siklus yang baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil. Proses kolaboratif diawali dialog tatap muka dengan komunikasi yang mendalam diantara para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kesempatan dan mendapatkan capaian bersama. Dialog tatap muka merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, memahami beresama dan memiliki komitmen terhadap proses.

⁵⁷ Indri Erkaningrum F. 2015. *Collaborative governance: daya upaya perguruan tinggi merealisasikan harapan pemangku kepentingan*. Yogyakarta. Hlm. 17-19

⁵⁸ Ibid. 19

Membangun suatu bentuk kepercayaan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi. Jika pengalaman masa lalu saja telah menggambarkan rendahnya tingkat kepercayaan, maka pemangku kepentingan harus bisa menyediakan waktu dan biaya untuk memperbaiki kepercayaan tadi. Komitmen antar pemangku kepentingan menjadi sangat terkait dengan tata kelola kolaboratif, keyakinan bahwa kolaborasi merupakan cara terbaik untuk mencapai *outcome* yang diinginkan perlu dikembangkan diantara para pemangku kepentingan, adanya ketergantungan yang tinggi antara pemangku kepentingan akan menciptakan suatu komitmen yang tinggi pula.

Komitmen dalam tata kelola kolaborasi harus membutuhkan prosedur yang jelas, adil, dan transparan. Pemahaman bersama didefinisikan sebagai visi, misi dan tujuan bersama, nilai bersama, serta arah strategi yang jelas, selain itu pemahaman bersama dapat memberikan suatu kesepakatan dalam mengatasi suatu permasalahan secara bersama-sama⁵⁹.

1. Prinsip *Collaborative governance*

Dalam memulai suatu kerja sama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan panduan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Adapun prinsip kolaborasi atau kemitraan menurut suharyanto yaitu:

- a. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter.

Pada prinsip keserasian dengan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat maka akan dapat menjalankan suatu agenda

⁵⁹ Indri Erkaningrum F. 2015. *Collaborative governance: daya upaya perguruan tinggi merealisasikan harapan pemangku kepentingan*. Yogyakarta. Hal 17-19

pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta mengatasi masalah di beberapa aspek lainnya. Dalam setiap perkembangannya perlu adanya evaluasi dan pembelajaran yang bisa kedepannya dikembangkan lebih komprehensif⁶⁰.

b. Pemberdayaan

Kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimilikinya, namun terhalang pada keterbatasan pengarahan, ilmu pengetahuan dan lainnya. Kelemahan-kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya suatu program dari pemerintah atau non-pemerintah, sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, disini pemerintah bisa berperan pada pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat, menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam suatu pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia⁶¹.

2. Kendala *Collaborative Governance*.

Salah satu studi di Kanada pada tahun 2008 terhambatnya suatu kolaborasi disebabkan banyak faktor, terutama pada faktor budaya, faktor institusi dan faktor

⁶⁰ Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Hlm.185-186

⁶¹ Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Hlm. 185-186

politik. Terkait dengan faktor budaya adalah bahwa kolaborasi bisa gagal dikarenakan adanya kecenderungan budaya yang bergantung pada sistem prosedur dan tidak berani mengambil atau mencari suatu terobosan yang baru dengan beberapa resiko. Untuk terciptanya suatu kolaboratif yang efektif mensyaratkan para pelayan publik atau penyelenggara pemerintahan haruslah memiliki *skill* dan kesediaan untuk bisa menjalin suatu kemitraan yang bersifat pragmatik yang mana berorientasi pada hasil⁶².

Terkait dengan faktor institusi, kolaborasi bisa saja gagal diakibatkan karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang juga turut terlibat dalam kolaborasi tersebut. Institusi yang masih mengadopsi struktur vertikal diyakini menjadi suatu hambatan jalannya kolaborasi ini karena kolaborasi mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dengan non pemerintah⁶³.

Selanjutnya pada sisi politik, kolaborasi bisa saja gagal dikarenakan kurangnya inovasi pemimpin dalam mencapai suatu tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forward - looking*) adalah pemimpin yang bisa menjalankan suatu nilai-nilai dan tujuan yang nantinya diyakini dapat menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif

⁶² Sudarmo, 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media. Hlm.117

⁶³ Sudarmo, 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media Hlm.120

dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan tetapi tetap bisa memberikan suatu hasil-hasil yang positif⁶⁴.

2.3 Pembangunan Daerah Tertinggal

Pertumbuhan pembangunan di Indonesia pada realisasinya menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan perwilayahan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari perbedaan yang relatif cukup besar antara pembangunan wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pembangunan masih tidak dapat merata dan menyebabkan ketimpangan pembangunan serta tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan bagi pertumbuhan wilayah⁶⁵. Kurangnya pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah tertentu membuat terjadinya kesenjangan antar daerah tersebut, oleh sebab itu pembangunan di Indonesia harus dilakukannya perubahan mendasar sehingga daerah-daerah yang tertinggal dapat mempercepat pembangunan seperti daerah yang telah berkembang dan lebih maju.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pembangunan yang dilakukan di daerah yang wilayah serta masyarakatnya masih belum bisa berkembang sesuai perhitungan skala nasional di bandingkan dengan daerah lain. Pembangunan daerah tertinggal sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah karena pembangunan yang tidak merata akan mengakibatkan ketimpangan pada pembangunan nasional. Daerah-daerah tertinggal saat ini masih sangat banyak, sehingga diharapkan pembangunan dapat segera dipercepat agar pembangunan dapat merata dan masyarakat dapat merasakan pembangunan daerah yang setara dan tidak terjadinya ketimpangan pada daerah tertinggal dengan daerah lain yang telah maju.

⁶⁴ Ibid. 120

⁶⁵ Ibnu Redjo, Samugyo. Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Hlm. 75-78
<https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnu-redjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf>
(diakses 14 Februari 2019)

Kurangnya perkembangan daerah sangat dirasakan pada daerah-daerah tertinggal, dimana telah tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 bahwa terdapat 122 Kabupaten yang tergolong dalam daerah tertinggal. Ketertinggalan Kabupaten yang telah ditetapkan tersebut haruslah memiliki strategi dalam percepatan pembangunan karena daerah tertinggal keberadaannya tidak dilepaskan dari lingkungan sosial sebagai bagian dari ke-Indonesiaan.

Permasalahan besar yang terjadi dalam pembangunan hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia yang dimana menginginkan pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan daerah tertinggal terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang difokuskan selama 5 (lima) tahun kedepan yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) RPJMN 2015-2019. Renstra RPJMN 2015-2019 terdapat 8 (delapan) bagian yaitu harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, peningkatan upaya koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal, formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal, produktivitas masyarakat di daerah tertinggal, peningkatan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah, insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha⁶⁶.

Percepatan pembangunan dapat diberlakukan jika pemerintah daerahnya merancang strategi dalam pembangunan terlebih lagi telah adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerahnya dapat mengatur segala urusan di wilayahnya, sehingga dengan berlakunya peraturan tersebut seharusnya memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar

⁶⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. https://dijenpdt.kemendesa.go.id/Rencana_Strategis_Ditjen_PDT_Tahun_2015-2019-1.pdf (diakses 18 April 2019)

berlomba-lomba dalam mengunggulkan daerahnya. Aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal telah dijelaskan serta ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014, dimana Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan daerah tertinggal merupakan suatu pembangunan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional, mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, saran dan prasarana dasar daerah tertinggal serta menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan program prioritas serta dalam percepatan pembangunan dilihat dari sistem perencanaan pembangunan nasional. oleh karena itu, pembangunan dapat diekselerasikan serta menjadikan suatu proses dan tindakan untuk masa depan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat banyak caranya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, karena setiap daerah tidak sama dari aspek mana yang kurang dalam pembangunannya, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur maupun dari sumber daya manusia.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah tertinggal yang juga terus berusaha mempercepat pembangunan wilayahnya. Percepatan pembangunan yang dilakukan Kabupaten Sumbawa Barat ditinjau dari aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu memenuhi kebutuhan intelektual agar masyarakatnya cerdas dan dapat bersaing dengan daerah yang lebih dulu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Kabupaten Sumbawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai subsidi biaya pendidikan agar setiap masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dapat bersekolah dengan gratis dan fokus pada masa depan mereka sehingga kelak dapat membangun daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan lebih baik lagi, pendidikan merupakan sebuah jembatan untuk investasi di masa mendatang. Percepatan pembangunan merupakan salah satu kebutuhan mendesak termasuk dalam pembangunan jangka menengah.

Diberlakukannya peraturan tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menggratiskan pendidikan untuk kesemua lapisan masyarakat khususnya yang tidak mampu serta memfasilitasi masyarakatnya agar Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakatnya mendapat pendidikan secara gratis dan percepatan pembangunan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis agar hasil dan dampak dari percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.4 Kebijakan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi⁶⁷. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan

⁶⁷ Zamzuri, M. 2016. *Pengaruh Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur KMS Kelas XI SMKN 3*. Yogyakarta: E-Jurnal Pendidikan Teknik Mesin, 4(8), 583-590

sumber daya manusia dalam pembangunan suatu Negara⁶⁸. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat membangun suatu bangsa dan Negara.

Pendidikan berperan penting dalam menyediakan generasi yang berkualitas. Adanya pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang terasah, terampil dan berkualitas dalam menghadapi tantangan⁶⁹. Pendidikan sebagai pilar masa depan yang menjadikan hal tersebut wajib di dapatkan oleh setiap individu⁷⁰. Pendidikan dapat membantu manusia untuk menyiapkan generasi menjadi sadar terhadap peran dan tanggung jawabnya dan menyediakan generasi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Pembangunan pendidikan pada saat ini direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Pada program renstra kemendikbud, telah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK⁷¹.

Hakekatnya pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

⁶⁸ Musyaddad. 2013. *Problematika Pendidikan di Indonesia*. Problematika Pendidikan di Indonesia, 4.

⁶⁹ Montolalu, A. A. 2015. *Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung I*. Bandung: PT. Rosda karya

⁷⁰ Milah & Nurdin, E.S. 2015. Analisis Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun. *Sosietas*, 5(1)

⁷¹ Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/rencana-strategis-renstra> (diakses 18 April 2019)

Menyadari hal tersebut maka pada tahun 1994 telah dimulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang didasari dengan konsep “pendidikan dasar untuk semua” yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak⁷². Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pendidikan telah dominan meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial serta memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tertuang dalam pasal 31 ayat (1) dan (2). Menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar tersebut diharapkan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan, terlebih lagi ketika diberlakukannya otonomi daerah maka secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Pemberian otonomi ini

⁷² Herisusanto & Radhiah. 2015. *Kebijakan Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Darul Makmur*. Jurnal Bima Gogik, 2(2), 57-64

dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri⁷³.

Berlakunya otonomi daerah, membuat suatu daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, hal ini juga diterapkan oleh daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mana telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai pendidikan untuk menyederatakan keseluruhan lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 mengenai subsidi biaya pendidikan, merupakan program pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan sampai tamat sekolah menengah atas (SMA) agar tingkat pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat terus meningkat, serta dalam peraturan daerah tersebut pemerintah telah memberikan fasilitas dalam biaya sekolah untuk memudahkan masyarakat mendapat pendidikan khususnya yang tidak mampu.

Program wajib belajar 12 tahun terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Tujuan dari program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk dan diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMA atau sederajat⁷⁴. Berlakunya program pendidikan 12 tahun tersebut membuat masyarakat akan terpacu untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA karena apabila pemerintah tetap serius dalam menjaga kesinambungan program pendidikan dasar 9 tahun dan banyaknya lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan sekolah serta masih belum layak bekerja sehingga apabila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik.

⁷³ Putera. 2010. *Formula Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di kabupaten Solok*. Jurnal Demokrasi, 9 (Nomor 2), 205-226

⁷⁴ Ratnawati, Suwitri & Rengga. 2013. *Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus*. Journal Of Publik Policy and Management Review, 2(3), 273-282

Pada tahun 2013 yang lalu pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan suatu program dari pemerintah yang harus diikuti untuk setiap warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah⁷⁵. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Startegi (renstra) Kementrian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dilaksanakan dari pembangunan pendidkan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi dan kota.

Pendidikan di kabupaten Sumbawa Barat diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, kesinambungan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif serta dalam norma-norma agama. Tujuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan, pemerintah daerah dalam melihat kondisi pendidikan sesuai capaian karakteristik wilayah sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia.

Program wajib belajar 12 tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal (SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat sampai dengan pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK, MAK dan bentuk lain yang sederajat), pendidikan non formal (program paket A, paket B dan paket C serta bentuk lain yang sederajat). Hakekatnya agar pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat bersaing dengan daerah maju dengan cara Kabupaten Sumbawa barat mewajibkan program belajar 12 tahun.

Sesuai degan peraturan tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat telah memberlakukannya pendidikan 12 tahun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

⁷⁵ Kusuma Wardani Welly. 2015. *Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur)*. Journal Of Politic and Government Studies, 4(2), 371-388

Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat pada pasal 1 ayat (4) bahwa program wajib belajar dua belas tahun adalah program minimal yang harus diikuti oleh semua warga yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat atas tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu 6 tahun di SD/MI, 3 tahun di SMP/MTs dan 3 tahun di SMA/MA/SMK atau pendidikan sederajat⁷⁶.

Berlakunya program mengenai pendidikan wajib 12 tahun tersebut membantu meningkatkan indeks sumber daya manusia, akan tetapi pada tahun 2017 SMA/MA/SMK dialihkan ke provinsi meskipun demikian Kabupaten Sumbawa Barat tetap melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal. Berdasarkan peraturan daerah tersebut dapat dipahami bahwa program wajib belajar 12 tahun yaitu usia tujuh (7) sampai dengan delapan belas (18) tahun untuk jenjang pendidikan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok dan lembaga masyarakat.

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat